

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik di Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai, yang dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni:
 - a) Tahap Perencanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, karena dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, hal ini disebabkan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Bangka Kenda kepada masyarakat Desa Bangka Kenda.
 - b) Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, karena penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun karena kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Bangka Kenda masih kurang efektif.

- c) Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, karena penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Bangka Kenda serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Bangka Kenda. Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.
2. Faktor-faktor penghambat efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Bangka Kenda yaitu:
- 1) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2) Informasi.
 - 3) Partisipasi Masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Bangka Kenda kepada masyarakat Desa Bangka Kenda. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Desa Bangka Kenda melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi

Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai yang di harapkan. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Bangka Kenda sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Sebaiknya Pemerintah Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Alokasi Dana Desa. Serta perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa.
- Aldy, Riko. 2012. *Tinjauan Yuridis Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011*
- Agustin Amelyana, dkk. *Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang*. jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Ma.
- BPKP, 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa
- [Http://www.Landasanteori.com/2015/07.Pengertian Anggaran Menurut Definisi.html](http://www.Landasanteori.com/2015/07.Pengertian-Anggaran-Menurut-Definisi.html). Diakses pada 13 Maret 2018
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2.
- Kartasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Mardiasmo (2002) *Otonomi Dan Manajemen Daerah*. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Andi Miles, Matthew B, A Michael Huberman. (1992). “*Qualitative Data Analysis*”. Alih Bahasa: Tjejep Rohendi Rohindi. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muljana, B.S. *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V*. Jakarta: UI-Press. 2001.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2011.
- Pemerintah Desa Bangka Kenda. 2014. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2014-2019”
- Peraturan Desa Bangka Kenda Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangka Kenda Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.
- Prasetyanto PP , Eko. 2012. *Dampak Alokasi Dana Desa Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia*. Disertasi. IPB, Bogor.
- Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai No. 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Manggarai.
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).